

Indonesia dan Rivalitas Amerika Serikat dengan China di Kawasan Asia Pasific

Oleh :

1) Sutrisno

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta
Email: sutrisno.sutrisno1952@gmail.com

2) Meirinaldi

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta
Email: meirinaldi.2505@gmail.com

ABSTRACT

The aims of the article to analysis and know, how the Indonesian position between the rivalry The United State of America and China in the Asian Pasific region. The result of this analysis of this topic article that is competition to spheres of influence to the hegemony in the Asian Pacific Region between The United State of America and China. Impact of the rivalry two the countries had been rise of the escalation tension between The United of The America and China, also the trade war between The United State of America and China since the end of year 2018 have been rise the escalation tension two countries until now.

While of the same development the military instalations, the placement of Airborne and the Developed the reclamations island and to claim of Air Defence Identification Zone (ADIZ) in the Sinkoku island in East China Sea, and China claim "nine dash line zone" wich rich of Fisheries and Natural Gas Deposit. And China claims as the "Traditional Chinese Fishing Ground", the China claim in the Paracel and Spritlay continent in the South China Sea. Maritime conflict has draffie four ASEAN Countries, maritime conflict (Philipina, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia), Vietnam, Brunei, China, Taiwan and Indonesia at same time.

The China relation with Indonesia to appear conflict particularly fishing rights and natural resources operations and dispute area in the Zone Economic Exclusive (ZEE) in the North Natuna Sea. Among all claims, China persistently plays aggressive behavior by looking at the reclamation for military base camp. The United State has taken larger interest in the region of the South China Sea to freedom of navigation around dispute area while at same time deploying military presence that irritates China as the most aggressive party involving the South China Sea. The United State has taken larger interest in the region to claim of international navigation of the sea to freedom navigation in the international sea transportation in the South China Sea.

The China claimed Nine Dash Line and Traditional Chinese Fishing Ground in the North Natuna Sea, Indonesia officially have sent diplomatic protes to China officially note over incident , the January 2020 several Chinese Fishing boats in its 200-mile Exclusive Economic Zone (ZEE) off the North Natuna Sea. The incident at the North Natuna Sea between Indonesia and China the end not phisical conflict.

Keywords: The USA, China, The South China Sea, The Republic of Indonesia, Nine Dash Line, Traditonal Fishing Ground, Exclusive Economic Zone (ZEE) .

PENDAHULUAN:

Latar Belakang Masalah:

Indonesia sebagai suatu Negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk dalam tahun 2019 sekitar 267 juta jiwa, sedang dan terus melakukan pembangunan ekonomi untuk memenuhi tugas konstitusi sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Politik Luar Negeri Indonesia dilaksanakan atas dasar prinsip politik bebas aktif, yang berorientasi atas kepentingan nasional sebagai suatu Negara yang berdaulat, menjaga stabilitas dan keamanan regional dan global.

Dalam tata hubungan internasional peran Indonesia menunjukkan sejarah dengan memelopori persatuan Negara Negara berkembang, khususnya Negara yang memerdekakan dari penjajahan imperialisme setelah berakhirnya Perang Dunia II yakni pada tahun 1939 – 1945. Pada bulan April 1955 Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan Negara – Negara bekas jajahan.

Kepeloporan Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran antar bangsa – bangsa dilanjutkan pada inisiatif dibentuknya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of The South East Asian*

Nations) ASEAN pada 8 Agustus 1967 yang dideklarasikan di Bangkok Thailand, atas inisiatif Presiden Republik Indonesia Soeharto, Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Filipina dan Perdana Menteri Singapura. Dalam perkembangan selanjutnya anggota ASEAN menjadi 10 negara yakni: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Kebijakan luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui diplomasi yang bersifat bilateral, regional dan multilateral dengan berpedoman pada kemampuan dan kekuatan yang bersifat *soft power* dan *hard power* dengan cara yang cerdas (*smart power*). Pada abad ke-21, konstelasi politik internasional mengalami perubahan signifikan.

Hubungan antar negara tidak lagi didominasi oleh pertarungan dua kekuatan adidaya (*bipolar*) antara Amerika Serikat *versus* Uni Soviet (sekarang Rusia) yang saling mempengaruhi sebagaimana yang terjadi pada era Perang Dingin, tetapi semakin mengarah pada munculnya kekuatan multipolar dengan tarikan kuat dari pusat-pusat kekuatan baru untuk membentuk tatanan internasional yang baru. Fenomena ini juga dibarengi dengan semakin kuatnya pengaruh globalisasi yang dicirikan dengan peningkatan saling keterkaitan dan atau ketergantungan antarbangsa melalui peningkatan perdagangan, investasi dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Dunia cenderung semakin terintegrasi secara global menimbulkan dilema dalam pemaknaan kedaulatan negara. **Sementara kecenderungan adanya berbagai bentuk integrasi regional dan menguatnya peran perusahaan multinasional serta lembaga masyarakat yang semakin signifikan di**

dalam hubungan internasional juga melahirkan identitas baru dalam hubungan luar negeri dan diplomasi, yang tidak lagi sepenuhnya menempatkan Negara sebagai actor tunggal. Selain itu, ketegangan, perselisihan dan konflik antarnegara tidak lagi semata dipicu oleh ancaman keamanan yang bersifat tradisional (ancaman militer dan proliferasi nuklir), melainkan juga nontradisional yang sifatnya lintas batas, seperti terorisme, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, imigran ilegal, perdagangan manusia, pencurian ikan ilegal, penyelundupan senjata, pembalakan liar, lalu lintas narkoba, krisis keuangan global, dan masalah perbatasan.

Dinamika global yang penuh dengan tantangan, sekaligus peluang menuntut kemampuan negara melihat perkembangan dan menetapkan kebijakan serta strategi hubungan luar negeri yang tepat, agar mampu berkiprah untuk menarik keuntungan yang maksimal bagi kepentingan nasional. Pada satu sisi, politik luar negeri harus mampu mengantisipasi berbagai kecenderungan dan potensi yang terjadi di luar negeri untuk mengamankan kepentingan nasional. Pada sisi lain, politik luar negeri harus mampu mengantisipasi berbagai kecenderungan dan potensi yang terjadi di luar negeri untuk mengamankan kepentingan nasional. Pada sisi lain, bagaimana berbagai permasalahan dan potensi yang ada di dalam negeri sebagai suatu kepentingan nasional untuk diperjuangkan di luar negeri. Pandangan politik luar negeri Indonesia harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Dalam konteks dengan judul penulisan ini, penulis melakukan kajian dan analisis bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan tantangan persaingan perebutan pengaruh /rivalitas

antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China (RRC) di Kawasan Asia Pasific. Serta menekan sekecil mungkin dampak yang kurang menguntungkan bagi Indonesia sebagai akibat rivalitas/perebutan pengaruh di kawasan Asia Pasific antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China, ditinjau dari aspek geopolitik, geostrategic dan geoekonomi.

Perumusan Masalah

Penulisan judul karya tulis ini bermaksud mengidentifikasi dan merumuskan masalah bagaimana posisi Indonesia dalam tata hubungan Internasional khususnya ditengah persaingan perebutan pengaruh atau /hegemoni antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China di kawasan Asia Pasific, serta apa dampak/pengaruh terhadap Indonesia ditinjau dari aspek geopolitik, geostrategic dan geo ekonomi. Manfaat apa yang dapat diperoleh Indonesia dari posisi geografis yang strategis, terletak atau dilalui oleh Selat Malaka yang menghubungkan Negara Negara di Asia Barat, Asia Selatan meliputi India, Sri Langka yang terletak di sekitar Lautan Hindia, juga Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam yang terletak di Laut China Selatan. **Dengan politik yang bebas dan aktif apakah Indonesia mampu mendudukkan dalam posisi yang menjaga jarak dan kedekatan yang sama dengan AS dan RRC, serta membawa manfaat ekonomi, politik, dari persaingan perebutan pengaruh (*sphere of influence*)/hegemoni antara AS dengan RRC untuk kepentingan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, budaya bagi Indonesia.**

Tujuan Penulisan :

Tujuan penulisan dengan mengambil judul “Indonesia Dan Rivalitas Amerika Serikat Dengan China di Kawasan Asia Pasific “ adalah untuk mengetahui akibat persaingan perebutan pengaruh AS dan RRC di kawasan Asia Pasific terhadap Indonesia dari sudut pandang dan analisa **aspek geopolitik, geostrategic dan geoekonomi**. Prinsip politik Luar Negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif, adalah bagaimana peranan Indonesia dalam hubungan luar negeri ditinjau dari bilateral, regional dan multilateral/global serta seberapa besar manfaat yang didapatkan Indonesia dalam hubungan antar Negara (bilateral), hubungan dengan sesama anggota ASEAN, hubungan dengan Republik Rakyat China, dengan Amerika Serikat, ditinjau dari aspek geopolitik, geostrategic dan geoekonomi. Strategi dan kebijakan apakah yang harus ditempuh Indonesia untuk memperoleh **manfaat ekonomi, politik** dalam mensikapi adanya persaingan perebutan pengaruh antara RRC dan AS di kawasan Asia Pasific.

METHODE DAN MATERIAL

Metode Penulisan:

Metode penulisan paper ini berdasarkan sumber data sekunder yang diperoleh dari data pustaka, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah dan sumber lain yang kredibel.

Material

Dalam uraian, penjelasan terkait dengan materi pokok bahasan “Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China serta posisi Indonesia ditinjau dari Aspek Geopolitik, Geostrategis dan Geoekonomi. Kami sampaikan gambaran

singkat tentang Indonesia, Republik Rakyat China dan Amerika Serikat dari jumlah penduduk, Pendapatan Domestik Bruto, Income per Kapita, Cadangan Devisa, Hutang, pertumbuhan ekonomi, investasi langsung. Selain gambaran tentang Indonesia, Republik Rakyat China, Amerika Serikat, disampaikan juga tentang ASEAN(*The Association of The South East Asia Nations*), RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) yang terdiri 10 negara anggota ASEAN, ditambah Republik Rakyat China, India, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru dan Australia. Organisasi kerjasama/kemitraan .Asosiasi Kerjasama Lingkar Samudera Hindia atau *Indian Ocean Rime Association (IORA)* . Faktor-faktor yang mendasari mengapa perlu disampaikan dan dianalisa organisasi regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan forum/organisasi kerjasama ekonomi, perdagangan antara ASEAN plus 6 negara yang tergabung dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, karena ada saling keterkaitan dan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Republik Indonesia:

Republik Indonesia yang baru memproklamasikan sebagai sebuah Negara merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945, setelah mengalami penjajahan sekitar 350 tahun oleh Kerajaan Belanda selama beberapa tahun oleh Inggris, Portugal dan Jepang. Data geografis Indonesia terdiri atas sekitar 30% daratan dan 70% lautan, dengan pulau pulau besar yakni: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, pulau pulau kecil seperti Bali, Lombok, Timor dan pulau pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 tercatat 267 juta, dengan income per kapita sebesar USD,4.050 ,-

pertumbuhan ekonomi 5,03%, penduduk miskin 24,78 juta, pengangguran mencapai 7,00 juta, Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp.15.583 Triliun . Dengan barang ekspor didominasi oleh barang/komoditi primer seperti, minyak kelapa sawit/ Crude Palm Oil (CPO), karet, coklat, kopi, batubara dan hasil tambang lainnya dengan nilai perdagangan ekspor dan import sebesar USD.293,061 milyar. Angka/neraca perdagangan terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2012 sebesar USD.381,709 milyar, 2013 USD.309,180 milyar, tahun 2014 sebesar USD.354,158 milyar dan tahun 2015 sebesar USD. 293,061 milyar, Tahun 2016 Total US\$.280,839 milyar, tahun 2017 total US\$325,813 milyar, tahun 2018 total US\$.368,723 milyar, dan 2019 total US\$.338,251 milyar Nilai Investasi langsung (Foreign Direct Investment) sebesar Rp.545,5 triliun pada tahun 2015. Tahun 2016 sebesar Rp.612,8 triliun, tahun 2017 sebesar Rp.692,8 triliun, tahun 2018 sebesar Rp.721,3 triliun, tahun 2019 sebesar Rp.809,6 triliun. Terkait dengan pandemic Covid 19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi – 5,32%, dan untuk pemulihan ekonomi akibat Covid 19, Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar Rp.695,2 triliun, yang terdiri untuk pemulihan Kesehatan sebesar Rp.87,5 triliun, dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp.807,7 triliun, serta pengeluaran dana hibah untuk modal kerja pelaku usaha Ultra Mikro dan Mikro sebanyak 12 juta orang/pelaku usaha, yang masing masing mendapat dana hibah sebesar Rp.2,4 juta. Juga subsidi gaji kepada karyawan yang bergaji di bawah Rp.5.juta perbulan, dengan subsidi per orang Rp.600.000,- per bulan selama 4 bulan untuk 13,7 juta orang karyawan. Stimulus ekonomi tersebut

bertujuan mendongkrak permintaan/konsumsi masyarakat, mengingat konsumsi masyarakat mengalami penurunan sekitar 5,3%.

Republik Rakyat China

Republik Rakyat China, system pemerintahannya berhaluan komunis, sejak Partai Komunis China (PKC) mengambil alih kekuasaan di China Daratan pada tanggal 1 Oktober 1949, dari partai Nasionalis China (Kuomintang) yang berhaluan Nasionalis, dan pemimpinnya ialah Chiang Kai Shek melarikan diri ke pulau Formosa/Taiwan. Yang hingga saat ini Taiwan oleh RRC masih diklaim/ diakui bahwa pulau Formosa / Taiwan adalah bagian dari RRC, yang sampai sekarang masih belum selesai masalah Taiwan tersebut. Selama waktu dari tahun 1949 – 1978 RRC menganut system ekonomi sosialis yang tersentralisasi di pusat pemerintahan, yang berkiblat ke Uni Soviet. Pada tahun 1978 RRC dibawah Perdana Menteri Deng Xiao Phing melakukan reformasi ekonomi dengan sistim ekonomi yang terbuka. Kemudian pada tahun 1989 reformasi ekonomi diteruskan oleh Perdana Menteri Jiang Zemin, kemudian diteruskan oleh Presiden Hu Jianto, dan diteruskan oleh Presiden Xi Jinping sampai sekarang. Sejak melakukan kebijakan ekonomi terbuka, pembangunan ekonomi RRC mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, dengan rata-rata pertumbuhan diatas 7% pertahun. Pembangunan industry, pertanian dan jasa-jasa dan perdagangan yang cukup pesat, untuk pembangunan industry dimulai dengan pembangunan kawasan industry diberbagai propinsi antara lain. Pembangunan zone ekonomi dan teknologi, Bonded Area, Zone Kerjasama Ekonomi Perbatasan, Zone Proses Ekspor, Zone pembangunan tingkat propinsi.

Pusat – pusat Ekonomi yang menarik investor-investor asing misalnya di *Tianjin Economic Technological Development Area*, *Ningbo Free Trade Zone*, *Zhuhai Free Trade Zone*, Zone Pembangunan Ekonomi Hangzhou dan lain-lain. Kemajuan pesat ekonomi RRC memerlukan pasar untuk menjual hasil produksinya, disamping memerlukan pasokan/supply energy dan bahan baku. Untuk memuluskan ambisi perluasan pasar dan ekonominya RRC melakukan inisiatif menghidupkan jalur sutera, pada tahun September dan Oktober 2013 Presiden Xi Jinping menyampaikan/membuat inisiatif Sabuk Ekonomi Jalur Sutera dan Jalur Sutera Maritim abad 21, yang kemudian disebut Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan atau *One Belt One Road (OBOR)*. Sampai dengan Agustus 2015 menurut data *China International Trade Institute* terdapat 65 negara yang berpartisipasi dalam kerangka kerjasama dan platform OBOR. Ke-65 negara tersebut berasal dari wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan dan Eropa. Sementara itu, di dalam OBOR, Tiongkok berencana menghubungkan ekonomi dan infrastruktur antar Negara dan antar kawasan kedalam enam koridor, yaitu New Eurasian Land Bridge, Koridor Ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia, Koridor Ekonomi Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, Koridor Ekonomi Indo-China Peninsula, Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan dan Koridor Ekonomi Bangladesh-Tiongkok-India-Myanmar. Luas dan bervariasinya Negara dan kawasan yang ingin berpartisipasi dalam proyek raksasa OBOR membuat proyek ini menjadi salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah geoekonomi dan geopolitik di abad ini. Proyek OBOR melintasi wilayah geografis antar Negara-kawasan dengan

beragam ideologi politik, system pemerintahan, kualitas infrastruktur, dan beragam kepentingan (*interest*) masing-masing Negara.

Dengan konsep OBOR China mendapatkan momentumnya setelah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat melakukan kebijakan yang cenderung proteksionisme dengan semboyannya *The First America*. Kekuatan ekonomi Tiongkok juga menimbulkan peningkatan anggaran militer RRC yang pada tahun 2016 posisi anggaran militernya mencapai sebesar 954,35 milyar Yuan atau US\$.138,40 milyar. Sedangkan anggaran militer Tiongkok (RRC) pada tahun 2017 diperkirakan naik 7% dari tahun 2016, sehingga menjadi sebesar 1,02 Triliun Yuan. Jumlah penduduk RRC pada tahun 2015 sesuai data *World Bank* sebesar 1,37 milyar orang, luas wilayah 9,39 juta km², dengan Produk Domestik Bruto sebesar US\$.1,01 triliun, income/PDB per kapita US\$, 8.028,-, cadangan devisa US\$.3,41 triliun.

Dari sudut geopolitik klaim Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan dengan klaim Cina terhadap perairan Natuna *Nine Dash Line* atau 9 garis putus-putus sebagai warisan leluhur Tiongkok terhadap daerah maritime sampai Natuna. Sengketa wilayah dengan Laut Cina Selatan dengan Filipina. Di Laut Cina Timur Sengketa pulau Shinkoku atau Dae-yu antara Tiongkok dengan Jepang sampai sekarang belum selesai bahkan RRC secara sipihak mengklaim batas wilayah udara atas kepulauan Sinkhoku, *ADIZ (Airborne Defence Identification Zone)*. Hubungan yang kurang bagus antara Indonesia dengan Tiongkok, terkait dengan klaim China bahwa wilayah perairan Natuna merupakan bagian wilayah tangkapan ikan/nelayan

tradisional (*Traditional Chinese Fishing Ground*) Tiongkok dari sejak dulu oleh nenek moyangnya, perbedaan tersebut telah menimbulkan ketegangan regional. Antara lain RRC dengan Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, juga dengan Jepang, Taiwan, Korsel.

Terkait dengan kemungkinan timbulnya sengketa wilayah di perairan Natuna dilautan Lautan China Selatan karena klaim sepihak Republik Rakyat China bahwa wilayah perairan Natuna merupakan bagian wilayah tangkapan ikan/nelayan tradisional (*Traditional Chinese Fishing Ground*) berpotensi menimbulkan konflik/sengketa dengan Indonesia. Itulah dampak persaingan perebutan pengaruh/hegemoni di kawasan Asia Pasific antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China terhadap Indonesia ditinjau dari aspek geopolitik, geostrategic dan geoekonomi.

Pengeluaran/belanja militer Cina tahun 2016 mencapai 954,35 Milyar Yuan atau setara US\$.138,40 milyar, untuk belanja militer tahun 2017 sekitar 1,044 Triliun Yuan atau setara US\$.151,43 milyar atau sekitar 1,3% dari PDB Cina. Cina terus memodernisasi kekuatan militernya sejalan dengan perkembangan ekonominya yang semakin meningkat. Menurut penjelasan juru bicara pemerintah Cina selama ini Cina mengedepankan dialog untuk resolusi damai, namun disaat yang bersamaan Cina membutuhkan kemampuan militer untuk membela, menjaga kedaulatan dan kepentingan Cina. Alasan Cina memperkuat kekuatan militernya adalah untuk mencegah kekuatan-kekuatan asing yang ingin mencapuri sengketa territorial Cina. Disamping itu alasan Cina meningkatkan kemampuan militernya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas

regional. Untuk mendukung pembangunan ekonomi di Asia Pasific, China memelopori pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia (*The Asian Infrastructure Investment Bank*). Perkembangan hubungan Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China akhir akhir ini nampak mengalami ketegangan terkait dengan perdagangan kedua negara, pada tahun 2017 Export RRC ke USA sebesar US\$.522,9 milyar, import RRC dari USA sebesar US\$.187,5 milyar, sehingga Neraca Perdagangan Surplus US\$.365,4 milyar untuk RRC. Dengan terus defisitnya neraca perdagangan USA dengan RRC, presiden Donald Trump melaksanakan perang dagang dengan RRC, dengan mensikkan tarif bea masuk atas barang barang impor dari RRC sebesar US\$.200. milyar atas 5.700 kategori produk China dikenakan pajak 10% menjadi 25% , atas tindakan USA tersebut RRC membalas dengan akan menaikkan bea masuk dari 5% - 10% menjadi 10% impor dari USA senilai US\$.60. milyar. Dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan RRC menimbulkan tekanan terhadap perdagangan dunia. Terkait dengan Covid 19, dimana pandemi Covid 19 berasal dari Wuhan, China, RRC cukup banyak terdampak dari Covid 19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi RRC mengalami kontraksi minus 6%, banyak perusahaan industri yang menghentikan produksi karena supply chain bahan baku terganggu akibat negara negara didunia melakukan lock down.

Amerika Serikat

Berdasarkan data dari World Bank, jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 2015 berjumlah 321 juta orang dengan luas wilayah 9,15 juta km². Pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2015 sebesar US\$.18,07 Triliun, Income perkapita

sebesar US\$.56.116,-, cadangan devisa US\$.0,38 triliun. Data angka Ekspor AS ke RRC pada tahun 2016 sebesar US\$.116.milyar, sedangkan angka impor AS dari RRC mencapai sebesar US\$.463.milyar. sehingga AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan RRC sebesar US\$.347.milyar. Sedangkan angka realisasi investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) Amerika Serikat ke Republik Rakyat China pada tahun 2015 mencapai sebesar US\$.228.milyar, sedangkan akumulasi Investasi langsung (*FDI*) RRC ke AS sebesar US\$.64.milyar. Berdasarkan data tahun 2016, angka FDI Jepang di AS mencapai US\$.373.milyar. Namun investasi RRC di AS dalam bentuk surat berharga/ Obligasi pemerintah AS mencapai US\$.1,05 triliun sehingga membantu mengatasi defisit anggaran AS. Dibawah Presiden Donald Trump anggaran militer Amerika Serikat direncanakan mencapai US\$.603.milyar dan hingga saat ini Amerika Serikat menjadi Negara yang memiliki kekuatan militer paling unggul di dunia. Sejak Presiden Donald Trump terpilih dan dilantik sebagai presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017 dengan semboyan nya *America First*, kebijakan ekonomi dan politik lebih bersifat inward looking, dalam arti ingin membangun ekonomi dan politik yang lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang membawa kemakmuran rakyat, dan melindungi perusahaan Amerika Serikat Berjaya/menguasai dalam negeri, dan mengurangi peran ekonomi asing di Amerika Serikat, artinya ekonomi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat Amerika, sehingga cenderung proteksionis. Donald Trump berusaha mengurangi keterlibatan Amerika Serikat dalam bidang militer di dunia yang mengeluarkan anggaran cukup besar, juga memberikan kesempatan

berkembang perusahaan-perusahaan di Amerika, daripada perusahaan asing atau produk asing menguasai pangsa pasar di Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Amerika Serikat dari organisasi regional yang dulu di inisiasi oleh Amerika Serikat, misalnya pakta Kemitraan Trans Pasifik (*Trans Pacific Partnership*) yang merupakan organisasi regional dibidang ekonomi, perdagangan bagi negara negara yang terletak di Asia yang bermaksud melakukan kerjasama pembangunan ekonomi, perdagangan antar anggota *Trans Pasific Partnership*. Sebagaimana dikemukakan diatas, karena neraca perdagangan USA dengan RRC yang terus mengalami defisit bagi USA, maka Donald Trump melakukan tindakan perang dagang kepada RRC, atas kebijakan USA tersebut RRC melakukan tindakan balasan kepada USA dengan menaikkan bea masuk barang impor dari USA. Terkait dengan Covid 19, Amerika Serikat melakukan tekanan kepada China bahwa, virus Covid 19 yang berasal dari Wuhan sebagai kesengajaan China dalam menyebarkan virus Corona, meskipun bukti atas tuduhan tersebut tidak didukung data yang valid, namun menyebabkan hubungan AS dengan China semakin meningkat ketegangannya, hal ini ditandai dengan permintaan AS untuk menutup konsulat jendral China di Houston, dan China ganti membalas dengan meminta AS menutup konjennya di Cengdu, China pada bulan Juli 2020.

Kawasan Asia Pasific ditinjau dari Geopolitik, Geostrategis dan Geoekonomi

Letak geografis, jumlah penduduk, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terletak di Asia dengan jumlah penduduk RRC sebesar 1,4 milyar, India sebesar 1,3 milyar, negara-negara yang

tergabung di ASEAN mencapai 650 juta, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh, negara-negara Asia Tengah, Rusia, merupakan potensi pasar bagi Amerika Serikat, Eropa, maupun Negara-negara di Asia sendiri, antara lain RRC, India, Korea Selatan, Jepang termasuk Negara-negara yang tergabung di ASEAN. Kawasan Asia dengan potensi ekonomi yang cukup besar sebagai pasar hasil produksi industry, pangan, jasa keuangan sekaligus juga menghasilkan produksi, pangan, dan perekonomian yang terus tumbuh/berkembang menjadi daya tarik Negara Amerika Serikat maupun Negara Eropa untuk memasarkan hasil produksi, jasa keuangan sekaligus tempat memenuhi barang-barang yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat, Negara-negara Eropa Barat. Letak geografis dan jumlah penduduk yang hampir mencapai 60% jumlah penduduk dunia, serta perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang menjadi daya tarik/magnet bagi Negara – Negara Barat. Karena posisi yang strategis dan penting dari aspek geoekonomi, geostrategic, geopolitik menjadi kawasan yang diperebutkan atau ingin mendominasi dalam menguasai/memperebutkan pengaruh di kawasan Asia dan Pasific untuk kepentingan ekonomi dan politik. Dalam perebutan pengaruh Amerika Serikat yang sudah sejak selesai Perang Dunia II menguasai pengaruh terhadap Jepang, Korea Selatan, India, Filipina, Thailand dan Indonesia khususnya sejak kegagalan pembontakan G30S/PKI cukup besar. Meskipun Amerika Serikat sejak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang cenderung mengambil kebijakan *inward looking* dengan slogan *America First* dengan mengutamakan kebijakan ekonomi yang mendorong perekonomian digerakkan oleh

pelaku pelaku bisnis domestic. Namun dari segi politik, militer keterlibatan Amerika di berbagai kawasan didunia apakah di Timur Tengah, Eropa dan Asia Pasific relative tidak banyak mengalami perubahan. Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang cenderung proteksionis, telah menimbulkan reaksi dari berbagai pemimpin dunia, hal ini tercermin dari sikap para pemimpin Eropa di Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) di Davos, Swiss pada 25 Januari 2018. (Kompas 26 Januari 2018).

Para pemimpin Eropa bersikukuh untuk mempertahankan perdagangan bebas dan kerjasama global guna melawan kebijakan guna melawan kebijakan proteksionis nasionalistik seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan Donald Trump juga diprotes oleh Korea Selatan dan China atas kebijakan proteksionis Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump memberlakukan tarif impor yang tinggi terhadap produk mesin pencuci pakaian dan panel surya. Kebijakan pajak kepada mesin pencuci pakaian pada tahun pertama akan diberlakukan tariff import 20% untuk 1,2 juta mesin cuci impor bagi rumah tangga dan tarif 50% untuk tambahan impor, meskipun tarif tersebut pada tahun berikut diturunkan, termasuk panel surya impor. Situasi geopolitik dengan meningkatnya ketegangan antara RRC dengan Vietnam, RRC dengan Jepang terkait dengan sengketa wilayah pulau Sinkoku.

Terkait dengan meningkatnya persaingan perebutan pengaruh/hegemoni di kawasan Asia Pasific antara Amerika Serikat dengan China, dapat disampaikan data ekonomi, berupa neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan China, Indonesia dengan Jepang sesuai data

statistic yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Indonesia. Neraca Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat menunjukkan surplus bagi Indonesia pada tahun 2015 sebesar US\$.8.647.juta, neraca perdagangan Indonesia – China menunjukkan Defiset bagi Indonesia sebesar US\$.14.364.juta, sedangkan neraca perdagangan Indonesia – Jepang menunjukkan surplus bagi Indonesia sebesar US\$.4.757 juta. Negara-negara di kawasan Asia Pasific yang ditinjau dari besarnya PDB, jumlah penduduk yang digolongkan besar mulai dari Republik Rakyat China, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Thailand dan Malaysia.⁴⁾

Meningkatnya eskalasi tensi/ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dengan China di kawasan Asia Pasific, khususnya klaim China terhadap Laut China Selatan yang merupakan kawasan/daerah warisan perikanan tradisional China, serta hubungan yang sedikit menaikkan dinamika/ketegangan di kawasan antara China dengan Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, juga di Laut China Timur yang menimbulkan ketegangan diplomatic antara China dengan Jepang, dengan Korea Selatan, menunjukkan dinamika dan peran strategis/pentingnya kawasan Asia dan Pasific ditinjau dari aspek geoekonomi, geopolitik dan geostrategic. Persiapan merebutkan pengaruh/hegemoni antara Amerika Serikat dengan China adalah dalam rangka juga penguasaan pasar perdagangan, penguasaan suplai sumber-sumber alam/energy di kawasan tersebut. Hal ini ditandai dengan Amerika Serikat perubahan strategi Amerika Serikat mengurangi / mengalihkan pusat kekuatannya dari Eropa, Irak dan Afghanistan ke kawasan Asia Pasific, dengan alasan karena meningkatnya/kebangkitan kekuatan

ekonomi dan militer China. China yang gencar menegenalkan program ***Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt One Route (OBOR)*** yang mengembangkan perdagangan dengan melalui mata rantai jalur darat, laut misalnya China mengembangkan jalur sutera yang menghukung kota kota China, dengan Negara-negara Asia Tengah, dengan Rusia dan Eropa Barat. OBOR menghubungkan jalur perhubungan laut OBOR yang menghubungkan China, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, Sri Langka, India terus ke Afrika. Langkah RRC dalam melakukan program maritime dan darat melalui ***BRI*** dipandang oleh beberapa Negara Asia dari aspek/segi “Geopolitik” adalah sebagai uapaya/langkah RRC untuk menaikkan “***posisi tawar/Bargaining Position dan political leverage***” atas Negara- Negara di kawasan Asia Pasific khususnya terhadap Negara-negara anggota ASEAN. Mega proyek BRI dilihat oleh beberapa Negara sebagai langkah/strategi China untuk memperbesar pengaruh geopolitik dan geostrategic di wilayah Asia Pasific, Eropa dan Afrika.

Dalam kaitan dengan sikap agresiv China dikawasan Asia Pasific, pemerintah India memandang/ beranggapan atau menegaskan bahwa inisiatif konektifitas harus senantiasa mengikuti prinsip tanggung jawab finansial untuk menghindari jangan sampai proyek-proyek semacam ini menciptakan beban utang yang “*unsustainable*” bagi masyarakat. India juga menegaskan bahwa BRI sebagai model ekonomi justru cacat dan berpotensi menciptakan akibat dan berpotensi menciptakan akibat ekonomi yang suram bagi apa yang disebut “***beneficiary nations***”. ***India emphasized the example of Hambantota Port in Sri Lanka besides***

experiences regarding Chinese projects in other nations to caution other nations seeking to be “beneficiaries”. Namun hubungan secara regional antara ASEAN sebagai organisasi kerjasama ekonomi, perdagangan regional diantara Negara-negara anggota ASEAN secara keseluruhan dengan China mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ekspor-Impor kedua belah pihak yakni ASEAN dengan China terus meningkat, investasi China di ASEAN juga terus meningkat, juga turis asal China yang berkunjung ke ASEAN pada tahun 2015 mencapai 18.596.000. orang. Peran China di ASEAN yang terus mengalami peningkatan disambut baik oleh Negara-negara ASEAN, namun dilain pihak menimbulkan masalah politik seperti dengan Vietnam, Filipina terkait Laut China Selatan, juga Myanmar dengan meningkatnya investasi infrastruktur juga menimbulkan kecemasan sosial di Myanmar. Upaya meredakan ketegangan antara China dengan Filipina, Vietnam terkait dengan isu Laut China Selatan yang bertujuan mendorong stabilitas dan keamanan di Laut China untuk mencegah terjadi insiden maritime. Kondisi untuk menciptakan kawasan yang damai di Laut China, tidak diikuti oleh sikap China yang justru secara diam-diam melakukan pembangunan pulau dan reklamasi, pembangunan pangkalan militer di wilayah yang dipersengketakan. Klaim sepihak China terhadap perairan Natuna bahwa daerah perairan Natuna, yang oleh China diklaim sebagai perairan tradisional wilayah tangkapan ikan (*Traditional Chinese Fishing Ground*) China dari sejak nenek moyang orang-orang China, juga menimbulkan masalah hubungan dengan Indonesia terkait dengan Kepulauan Natuna. **Bahkan China telah membangun Reaktor Nuklir Terapung untuk mensuplai**

kebutuhan China di Laut China Selatan, dimana sekitar 20 Reaktor Nuklir terapung telah dibangun khususnya di kepulauan Spritlay dan Paracel. Keberadaan reklamasi dan *mobile nuclear reactor* dinilai sebagai langkah China untuk menegaskan perairan Laut China Selatan merupakan milik mereka, China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina, **sedangkan Indonesia mengalami masalah hubungan dengan China terkait dengan perairan di Kepulauan Natuna, terkait klaim sepihak China, bahwa daerah perairan Natuna di Laut China Selatan merupakan wilayah penangkapan ikan laut tradisional China (*Traditional Chinese Fishing Ground*).** Jalur strategis tersebut dilalui kapal muatan barang dagangan senilai lebih dari US\$.5. triliun dalam setahun. Karena letak strategis baik dari segi geopolitik, geoekonomi dan geostrategic, ASEAN menghadapi sengketa wilayah dengan China di Laut China Selatan. Disamping itu Laut China Selatan telah menimbulkan tarik-menarik kepentingan diantara dua kekuatan ekonomi dan militer dunia antara China dengan Amerika Serikat di wilayah itu. Persaingan perebutan pengaruh/hegemoni dan keunggulan militer dikawasan Asia Pasific antara Amerika Serikat dengan China telah menimbulkan meningkatnya ketegangan di Asia Pasific, pembuatan pangkalan militer China di Laut China Timur di pulau yang disengketakan dengan Jepang dengan menciptakan atau klaim wilayah udara atau (*Airborne Defense Identification Zone/ ADIZ*) secara sepihak oleh China , juga kehadiran kekuatan militer di Laut China Selatan telah meningkatkan ketegangan di kawasan Asia dengan Negara-negara yang bersengketa dengan China. Dilain pihak Amerika Serikat meskipun Donald Trump mengambil kebijakan

ekonomi dan perdagangan yang cenderung proteksionis, namun keterlibatan control/pengawasan militer di Kawasan Asia Pasific makin ditingkatkan, hal ini untuk, menjamin kehadiran dan kekuatan/control politik di kawasan Asia Pasific. Persoalan geopolitik lainnya adalah meningkatnya ketegangan disemenanjung Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan yang dibantu Amerika Serikat. Percobaan/peluncuran rudal antar pulau yang berhulu ledak nuklir (*Inter Continental Ballistic Missile*) yang dilakukan oleh Korea Utara, dimana klaim Korea Utara bahwa rudal berhulu ledak nuklir tersebut dapat menjangkau kota-kota di Amerika Serikat, telah meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea, antara lain dengan meningkatnya latihan perang antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat untuk menghadapi sikap agresif Korea Utara tersebut.

Amerika Serikat dalam mensikapi/merespon Korea Utara yang terus melakukan percobaan rudal nuklirnya, melakukan pengiriman senjata anti/pencegat rudal ke Korea Selatan, perangkat pertahanan antirudal milik Amerika Serikat tersebut yaitu *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* telah dioperasikan di Korea Selatan pada bulan April 2017. Alasan Amerika Serikat menempatkan THAAD nya di Korea Selatan adalah untuk mencegah terjadi korban dan kerusakan lainnya apabila Korea Utara melakukan serangan rudal berhulu ledak nuklir ke Korea Selatan dan Amerika Serikat (pulau Hawaii), disamping itu juga untuk melindungi 24 000 tentara Amerika Serikat di Korea Selatan. Atas kebijakan Amerika Serikat menempatkan rudal pencegat rudal nuklir Korea Utara, China memprotes dan mengajukan keberatan atas pengiriman

senjata THAAD Amerika Serikat ke Korea Selatan, karena China beranggapan radar kuat THAAD tersebut mengancam keamanan wilayah China, dimana rudal anti rudal Amerika Serikat dapat menjangkau wilayah China. Dilain pihak Korea Utara juga menganggap keberadaan THAAD dan kapal-kapal perang Amerika menjadi ancaman bagi Korea Utara.⁷⁾

Sebagaimana dimuat di Koran Republika, Jumat 28 September 2018, judul “Militer Jepang dan Inggris Masuki Laut Cina Selatan”. **Jepang dan Inggris adalah sekutu Amerika Serikat yang paling dekat. Mereka memiliki kepentingan yang sama dalam “menahan pengaruh” Cina di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat, Inggris dan Jepang khawatir Cina dapat menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Amerika Serikat.** Cina yang bersengketa dengan Jepang tentang pulau Shinkoku, juga Cina dengan Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina terkait dengan kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan telah menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Asia Pasific. Juga dimuat di Republika hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 judul “Cina: Hentikan Operasi Amerika Serikat di Laut Cina Selatan”, ketegangan antara Cina dengan Amerika Serikat kembali meningkat. Pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Cina menyatakan kemarahannya pada Amerika Serikat setelah kapal perusak/fregat Angkatan Laut USA, USS Decatur berlayar dekat pulau-pulau yang diklaim oleh Cina di Laut Cina Selatan. Cina dengan tegas menentang operasi kapal perusak USA yang dianggapnya sebagai “mengancam” terhadap kedaulatan Cina. Seorang pejabat USA yang menjadi narasumber mengatakan bahwa, kapal

perusak milik USA, USS Decatur berlayar hingga sejarak 12 mil laut dari Pulau Gaven dan Johnson Reefs di kepulauan Spratly pada Ahad 30 September 2018. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan, kapal Angkatan Laut Cina dikirim untuk memperingatkan kapal USA agar meninggalkan perairan. Kementerian Pertahanan Cina menyebut Cina memiliki kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Otoritas Cina marah kepada Amerika Serikat karena sanksi USA terhadap militer Cina yang disebabkan Cina membeli peralatan militer kepada Rusia, dan ketegangan antara Cina dengan Amerika Serikat karena dukungan AS terhadap Taiwan. **Klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan tidak hanya ditentang AS, tetapi juga ditentang oleh negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Tetapi Cina dan ASEAN menyepakati rancangan yang akan menjadi dasar *Code of Conduct* atau kode etik di Laut Cina Selatan, dengan *Code of Conduct* tersebut ASEAN dan Cina berharap sengketa klaim di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi atau tanpa konflik.**

Dengan melihat persaingan perebutan pengaruh/hegemoni antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China di kawasan Asia Pasific, Indonesia sebagai Negara yang politik luar negerinya bersifat bebas aktif, harus dapat menempatkan pada posisi yang tepat diantara dua karang pulau atau dua Negara yang berebut pengaruh/hegemoni dikawasan yang diperebutkan. **Posisi dan kekuatan ekonomi China yang menduduki nomer dua setelah Amerika Serikat di perekonomian dunia, Indonesia harus mampu menempatkan netralitas yang**

aktif terhadap kedua Negara yakni China dan Amerika Serikat, tanpa mengurangi integritas dan kemerdekaan Indonesia untuk menghindarkan dari tarik menarik kepentingan yang apabila tidak pandai menjaga sikap dan jarak yang sama, akan menempatkan Indonesia masuk dalam blok atau control/kendali Amerika Serikat maupun China. Hubungan perdagangan, investasi dan ekonomi yang terus mengalami peningkatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan China, **menjadi faktor pertimbangan utama Indonesia untuk menjaga hubungan yang baik dengan kedua Negara yang bersaing dalam berebut pengaruh/hegemoni di kawasan Asia dan Pasific, tanpa mengurangi independensi Indonesia.**

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan :

Indonesia

Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 269 juta orang dengan tingkat kemiskinan masih sebesar 24,9 juta orang, angka pengangguran sebesar 7, 56 juta orang, angka investasi langsung (*Direct Investment*) mencapai Rp.809,6 triliun. Pembangunan ekonomi terus mengalami pertumbuhan meskipun masih dalam kisaran 5% pertahun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,03% . Dengan adanya pandemic Covid 19 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2020 mengalami kontraksi – 5,32%. Untuk mengatasi dampak dari pandemic Covid 19, Indonesia telah menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.695,2 triliun. Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan raya toll dan non toll, listrik, irigasi, pembangunan bandara, pelabuhan, kereta api, transportasi laut, udara

dan darat. Letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur lalulintas laut yang strategis yang dilalui menuju samudera Hindia, juga Laut China Selatan, sehingga secara geopolitik, geoekonomis, geostrategic Indonesia cukup strategis. Dalam organisasi regional Indonesia termasuk pelopor pendirian organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan pada 8 Agustus 1967, yang pendiri nya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapore. Indonesia juga menjadi anggota organisasi multilateral yakni anggota G.20. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif Indonesia dapat memainkan peran regional yang mendorong terciptanya kawasan regional yang damai, kerjasama perdagangan, ekonomi, prinsip non intervensi dan saling menghormati kemerdekaan masing-masing Negara anggota ASEAN, maupun antar Negara didunia. Dalam perbedaan pandangan dengan China menyangkut perairan Natuna yang merupakan bagian dari Laut China Selatan, dimana China menganggap perairan Natuna yang bagian dari Laut China Selatan, sebagai bagian dari perairan penangkapan ikan tradisional nenek moyang China (*Traditional Chinese Fishing Ground*) sampai dengan saat ini belum menimbulkan ketegangan hubungan diplomatic yang mengganggu hubungan kedua Negara. Sesuai dengan *Exclusive Economic Zone*, Indonesia memiliki zone ekonomi wilayah territorial ZEE 200 mil dari garis pantai Kepulauan Natuna, dimana ZEE telah di sahkan oleh Konvensi PBB III, *United Nations Conventions On the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Pada akhir tahun 2019 terjadi pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal kapal nelayan RRC yang memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan di perairan Kepulauan Natuna

Utara, dan kapal-kapal nelayan tersebut dikawal oleh Kapal Penjaga Pantai RRC, namun dapat diselesaikan dengan damai, setelah kapal-kapal perang dan pesawat tempur RI dikerahkan untuk menjaga/mengawal ZEE tersebut.

Republika Rakyat China.

China dengan penduduk sebanyak 1,37 milyar dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun, pembangunan ekonomi yang cukup spektakuler, dimulai dari tahun 1978 yang dilakukan oleh Perdana Menteri Deng Xiao Ping. Deng Xiao Ping melakukan reformasi ekonomi dengan system ekonomi yang terbuka, dari semula ekonomi system sosialis yang berkiblat ke Uni Soviet (sekarang Rusia). Setelah China melakukan system perekonomian terbuka/liberal, perekonomian China terus mengalami kemajuan yang spektakuler dengan pertumbuhan ekonomi pertahun diatas 7%. Pembangunan sektor industry, perdagangan dan jasa, infrastruktur, dengan pusat-pusat industri yang terus tumbuh dan berkembang dari investor investor asing yang menanamkan investasinya di China. Kemajuan ekonomi China memerlukan pasar untuk menjual hasil produksinya baik pasar domestik maupun pasar luar negeri. China dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat memerlukan pasokan bahan baku, energy, sumber-sumber alam lainnya. Untuk memenuhi ambisi perluasan pasar dan mendapatkan sumber-sumber energy, bahan baku industrinya, pada bulan Oktober 2013 Presiden Xi Jinping menyampaikan Inisiatif Sabuk Ekonomi Jalur Sutera dan Jalur Sutera Maritim abad 21, yang kemudian disebut Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan atau *One Belt One Road (OBOR)*. Sampai bulan Agustus 2015 menurut data ` terdapat 65 negara yang

menjadi anggota dan berpartisipasi dalam *OBOR*, yang anggotanya berasal dari negara-negara Asia, Eropa, Timur Tengah dan lain-lain. Untuk mendukung pembangunan di negara-negara berkembang khususnya di Asia Pasific yang dilalui *OBOR*, China mengambil inisiatif mendirikan Bank Investasi Infrastruktur Asia (*The Asian Infrastructure Investment Bank*).

Pertumbuhan ekonomi China yang cukup pesat, posisi tahun 2015 dengan jumlah penduduk 1,37 milyar, menunjukkan Produk Domestik Bruto sebesar US\$.1,01 triliun, pendapatan per kapita US\$.8.020,- dan cadangan devisa sebesar US\$.3,41 triliun. Untuk menjamin keamanan dan kepentingan bisnis/ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasific, China juga meningkatkan anggaran/belanja militernya, hal ini terkait dengan anggaran militer China pada tahun 2016 sebesar 954,35 milyar Yuan atau equivalent sebesar US\$.138,40 milyar, untuk tahun 2017 sebesar 1,02 triliun Yuan. Adanya sengketa antara China dengan Jepang masalah klaim pula Sinkokhu, di Laut China Timur, telah meningkatkan ketegangan dengan Jepang, China juga meningkatkan fasilitas militer di pulau yang disengketakan dengan Jepang, antara lain dengan membuat pangkalan militernya.

Amerika Serikat:

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Amerika Serikat sebanyak 321 juta, dengan Produk Domestik Bruto sebesar US\$.18,07 Amerika Serikat ke China mencapai US\$.116.milyar, sedang impor Amerika Serikat dari China sebesar US\$.463.milyar, sehingga neraca perdagangan Amerika dengan China, defisit sebesar US\$.347.milyar. Investasi langsung Amerika Serikat (*Foreign Direct Investment*) ke China pada tahun 2015

mencapai US\$.228.milyar, sebaliknya Investasi langsung China ke Amerika Serikat sebesar US\$.64.milyar, namun China melakukan investasi dalam surat berharga/obligasi di Amerika Serikat sebesar US\$.1,05 triliun. Anggaran militer Amerika Serikat sebesar US\$.603.milyar. Dengan terpilihnya Donald Trump, kebijakan ekonomi Amerika Serikat menunjukkan kearah proteksionistis, dengan slogannya **America First**, yang bertujuan melindungi industri/produk dalam negeri antara lain Donald Trump berencana akan menaikkan/mengenakan bea masuk/impor untuk baja sebesar 25% dan untuk alumunium 10%. Langkah pengenaan tarif bea masuk baja dan alumunium tersebut mendapat reaksi atau penolakan oleh China maupun mitra dagang Amerika Serikat misalnya Korea Selatan, Kanada, Argentina, Turki, Australia juga Meksiko, karena akan berdampak terhadap industri baja dan alumunium negara negara tersebut, yang pada gilirannya akan mengurangi ekspor baja dan alumunium karena semakin mahal, serta menimbulkan pengangguran sebagai akibat anjloknya penjualan baja dan alumunium. Bagi Amerika Serikat rencana menaikkan bea masuk/impor baja dan alumunium adalah untuk melindungi merosotnya penjualan baja dan alumunium akibat membanjirnya baja dan alumunium ke Amerika Serikat, juga untuk mencegah pengangguran tenaga kerja pabrik baja, alumunium akibat merosotnya penjualan baja dan alumunium di Amerika Serikat. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena anjlognya produksi baja, antara lain karena serbuan baja yang lebih murah China. Untuk kontribusi perdagangan China mencapai 16,3% dari seluruh perdagangan Amerika Serikat. Produksi baja Amerika Serikat pada tahun 1973 mencapai 151 juta ton, pada tahun 2016 hanya 85,6 ton.

Sedangkan produksi baja China pada tahun 2000 sebesar 127.236. metrik ton, tahun 2016 produksi baja 806.682 metrik ton. Sedangkan pangsa pasar ekspor baja China ke ASEAN mencapai 33,5% dari total ekspor baja China yang mencapai 108,4 juta ton.

Indonesia ditengah persaingan perebutan antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China di kawasan Asia Pasific.

Indonesia yang mempunyai penduduk , luas wilayah daratan, kepulauan, laut dan udara lautan yang terbesar dan terluas di antara negara-negara anggota ASEAN, serta lintasan/lalu lintas laut yang lebih besar dan strategis dalam hubungan baik politik, ekonomi, perdagangan dengan China dan Amerika Serikat. Posisi Indonesia ditengah organisasi perdagangan di Asean cukup strategis, Asia Pasific cukup besar karena pasar potensial berupa penduduk yang sekitar 267 juta. Keanggotaan di organisasi *APEC (Asian Pasific Economic Community)* yang anggotanya antara lain China, USA, Korea Selatan, Jepang, Indonesia. Organisasi regional bidang ekonomi lainnya yang Indonesia juga menjadi anggota antara lain di *RCEP (Regional Comprihensive Economic Partnership)*, *IORA (Indian Ocean Rim Association)*, *ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Mesin pertumbuhan Ekonomi Asia bertumpu pada negara negara RRC, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Thailand. Pertumbuhan ekonomi Asia akan ditopang oleh pertumbuhan kelas menengah Asia. Penguasaan teknologi khususnya IT. **Indonesia juga menjadi organisasi G.20 yang ber anggotakan Amerika Serikat, Inggris Perancis, Italia, Jerman, Kanada, Jepang, Rusia, China Tiongkok, India, Indonesia, Australia, Argentina, Turki, Meksiko, Arab Saudi,**

Korea Selatan, Afrika Selatan, Brazilia dan Uni Eropa. Juga keanggotaan Indonesia di *Trans Pacific Partnership* menjadi indikator bahwa keanggotaan Indonesia di beberapa organisasi perdagangan dan ekonomi baik regional, maupun multilateral, hendaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin ber keadilan bagi seluruh komponen masyarakat/ rakyat Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia. **Peningkatan persaingan perebutan pengaruh/hegemoni/rivalitas di Asia Pasific antara Amerika Serikat dengan Tiongkok hendaknya tidak mengurangi atau mengubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, hal ini harus dibuktikan dengan posisi Indonesia tidak terperangkap masuk dalam kekuatan Tiongkok maupun Amerika Serikat, tanpa mengurangi manfaat ekonomi bagi Indonesia dari persaingan perebutan pengaruh di Asia Pasific antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China/Tiongkok.**

Saran-Saran

Dengan prinsip politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, hendaknya politik Luar Negeri Indonesia menunjukkan arah dan implementasi hubungan luar negeri yang berorientasi memberi manfaat ekonomi, perdagangan, perdamaian, kesejahteraan, keamanan, kemerdekaan, kebebasan menentukan politik yang menghormati kedaulatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dalam menuntukan kebijakan dalam maupun luar negeri Indonesia. Dengan politik yang bebas aktif Indonesia sebaiknya dapat memainkan peran dan posisi Indonesia yang tidak masuk dalam pusaran blok atau pengaruh dari kekuatan negara super

power yang saling bersaing untuk merebutkan pengaruh/hegemoni khususnya di Kawasan Asia Pasific dalam hal ini antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.

Indonesia hendaknya dapat menempatkan dalam persaingan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan China di Asia Pasific, tidak berpihak atau masuk dalam blok kedua negara yang bersaing tersebut, **namun Indonesia justru bagaimana meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat mendorong peningkatan investasi, perdagangan dari Amerika Serikat maupun China, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.** Bahwa prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, dengan menjalin hubungan luar negeri yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, perdamaian, prinsip saling menghormati kedaulatan masing masing negara, Indonesia harus tetap meningkatkan kualitas dan jumlah peralatan militernya

dengan tetap untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan bangsa Indonesia, dengan kekuatan militer pada level **minimal essential force, dengan tetap mengedepankan diplomasi ekonomi yang dapat mendorong peningkatan perdagangan, investasi, ekonomi yang saling menguntungkan baik dengan Amerikat maupun dengan China.**

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Analisis, CSIS, Jakarta Edisi Vol. 46 Nomor 3, Kuartal Ketiga Tahun 2017
- Geopolitik & Kemanan Asia Pasific, Apa Peran Indonesia, Strategi Politik, Ekonomi & Keamanan, The Yudhoyono Institute, Jakarta , Oktober/November 2017, ISSN 2581-0324
- Re-Examining China's Rise In Asia Region, The Indonesian Quarterly, First Quarter 2018, Vol. 46 No. 1, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.